

Article History: Received: 2 July 2025, Revision: 17 July 2025, Accepted: 10 August 2025,
Available Online: 1 October 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i4.4754>

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPTD Pependa Di Provinsi Sumatera Utara

Yana Kumala Sari Sihaloho ^{1*}, Ratna Sari Dewi ², Indra Fauzi ³, Reza Hanafi Lubis ⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email : yanadoang9999@gmail.com ^{1*}, rsdewilubis@umnaaw.ac.id ²,
indrafauzi@umnaaw.ac.id ³, rezahanafilubis@umnaaw.ac.id ⁴

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD PEPENDA di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang artinya pendekatan dalam penelitian yang menggunakan data berbentuk angka. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel Purposive Sampling, sampel dipilih berdasarkan tujuan atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian. Karakteristik yang memiliki data keuangan UPTD PEPENDA berupa data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) dari tahun 2021 sampai 2023 dari UPTD Pependa di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. PKB, BBNKB dan PAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara. PKB, BBNKB dan PAP mempunyai hubungan yang kuat terhadap PAD yaitu sebesar 0,913, atau PKB, BBNKB dan PAP terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 91,3% sedangkan sisanya sebesar 8,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract. The purpose of this research is to determine the effect of Motor Vehicle Tax (PKB), Vehicle Transfer Duty (BBN-KB), and Surface Water Tax (PAP) on Regional Original Income (PAD) at UPTD PEPENDA in North Sumatra Province. The research method used is a quantitative method, which means an approach in research that uses numerical data. The sampling in this study uses Purposive Sampling, where samples are selected based on specific goals or characteristics deemed relevant to the research. The characteristics that have financial data from UPTD PEPENDA include data on Realization of Motor Vehicle Tax (PKB), Vehicle Transfer Duty (BBNKB), Surface Water Tax (PAP), and Regional Original Income (PAD). The data used is secondary data in a time series from 2021 to 2023 from UPTD Pependa in North Sumatra Province. The research results indicate that Motor Vehicle Tax has an effect on Local Own Revenue in North Sumatra Province, while Vehicle Name Transfer Fee does not affect Local Own Revenue in North Sumatra Province, and Surface Water Tax has an effect on Local Own Revenue in North Sumatra Province. PKB, BBNKB, and PAP collectively influence Local Own Revenue in North Sumatra. PKB, BBNKB, and PAP have a strong relationship with PAD, which is 0.913, meaning that PKB, BBNKB, and PAP account for 91.3% of PAD in North Sumatra Province, while the remaining 8.7% is influenced by other factors not included in this research.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Vehicle Name Transfer Fee; Surface Water Tax; and Local Own Revenue.

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Salah satu indikator kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menggali potensi ekonomi yang dimilikinya. Salah satu sumber PAD yang utama adalah penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan Pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara secara aktif melakukan berbagai upaya optimalisasi pajak daerah, termasuk digitalisasi layanan pajak, peningkatan sosialisasi, serta kerja sama dengan instansi terkait. Meski demikian, realisasi PAD dari ketiga jenis pajak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat fluktuasi penerimaan yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pajak daerah secara efektif dan efisien. Berikut adalah realisasi penerimaan PAD pada UPTD Pependa di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021-2023.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Provinsi Sumatera Utara

Jenis Penerimaan PKB		
Tahun	Target	realisasi
2021	2.292.103.398.694	2.267.830.152.008
2022	2.476.082.785.583	2.534.485.034.178
2023	2.664.794.03 8.378	2.680.220.169.070
Jenis Penerimaan BBN-KB		
Tahun	Target	realisasi
2021	1.238.514.469.424	1.328.477.361.738
2022	1.567.397.148.731	1.516.223.457.300
2023	1.793.102.338.152	1.511.306.731.624
Jenis Penerimaan PAP		
Tahun	Target	realisasi
2021	76.489.854.175	77.106.257.752
2022	165.423.620.760	187.241.858.454
2023	135.391.907.152	136.065.658.779

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan antara tahun 2021 hingga 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah,
- 2) Tingkat kepatuhan yang rendah, dengan banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan,
- 3) Ketidakakuratan data kendaraan, di mana banyak kendaraan yang tidak tercatat dengan baik atau tidak dilaporkan perubahan kepemilikannya,
- 4) Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan tepat waktu,
- 5) Tingginya transaksi jual beli kendaraan tanpa proses balik nama, serta banyaknya kendaraan bekas dari luar daerah yang tidak dibalik nama sesuai domisili baru,
- 6) Lemahnya pendataan Potensi Pajak Air Permukaan (PAP), dengan banyaknya pengguna air permukaan yang tidak terdata, terutama di sektor industri dan pertanian,
- 7) Kesulitan dalam pengawasan penggunaan air, terutama di perusahaan yang tidak dilengkapi alat ukur yang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD PEPENDA di Provinsi Sumatera Utara.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009). Perhitungan dasar pengenaan PKB, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Objek Pajak (NJKB);
- b) Bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul akibat perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam usaha (Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024). Perhitungan dasar pengenaan BBN-KB, sesuai dengan Perda Sumatera Utara No. 6 Tahun 2018, ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Objek Pajak (NJKB);
- b) Bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan (PAP) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. PAP merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024).

Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP)

Nilai PAP dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Jenis Sumber Air,
- 2) Lokasi Sumber Air,
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
- 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan,

- 5) Kualitas air permukaan,
- 6) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, serta
- 7) Tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air (Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018).

Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan

Besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

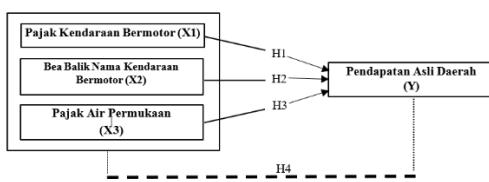
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Air Permukaan (X3), dan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Kerangka ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dan acuan yang pasti dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengaplikasikan teknik uji asumsi klasik, dengan pengolahan data menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) serta analisis pengelompokan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Pependa Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga 2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai variabel independen (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen (Y). Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, peningkatan Pendapatan

Asli Daerah pada sektor PKB, BBN-KB, dan PAP dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran yang berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least squares* (OLS). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi R²R^2R².

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-Smirnov* test. Kriteria pengambilan keputusan dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi < 0,05, berarti data tidak terdistribusi normal (terdapat perbedaan yang signifikan).
- 2) Jika nilai signifikansi > 0,05, berarti data terdistribusi normal (tidak terdapat perbedaan yang signifikan).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik adalah jika variabel-variabel independen tidak saling berkorelasi (ortogonal). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Umumnya, model dianggap mengandung multikolinieritas jika nilai VIF ≥ 10 atau nilai *tolerance* $\leq 0,10$.

Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Keputusan pengujian didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Jika $d < d_L$ atau $d > 4-d_L$ maka hipoteses nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi
- 2) Jika $d_U < d < 4-d_U$ maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi
- 3) Jika $d_L < d < d_U < d < 4-d_L$ artinya tidak ada Kesimpulan

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen dan untuk memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Romie Prisyastama, 2017:154).

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (PKB, BBN-KB, dan PAP) terhadap variabel dependen (PAD). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima, H_1 ditolak, artinya secara parsial penelitian ini tidak dipengaruhi.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima, artinya secara parsial penelitian ini berpengaruh.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen (PKB, BBN-KB, dan PAP) terhadap variabel dependen (PAD) dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan $\alpha=0,05\backslash\alpha = 0,05\alpha=0,05$. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, H_1 ditolak, artinya secara simultan penelitian ini tidak dipengaruhi.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima, artinya secara simultan penelitian ini berpengaruh.

Koefisien Determinasi R²R^2R²

Koefisien determinasi R²R^2R² digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat

menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R²R^2R^2, semakin besar pengaruh variabel independen (PKB, BBN-KB, dan PAP) terhadap variabel dependen (PAD).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tidak berpengaruh terhadap PAD di provinsi tersebut. Pajak Air Permukaan (PAP) juga berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Secara bersama-sama, PKB, BBNKB, dan PAP berpengaruh terhadap PAD di Sumatera Utara. Hubungan ketiga variabel tersebut dengan PAD memiliki kekuatan sebesar 0,913, yang berarti PKB, BBNKB, dan PAP berkontribusi sebesar 91,3% terhadap PAD, sedangkan sisanya 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Pengaruh terhadap PAD

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (PKB, BBN-KB, dan PAP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi (p-value) < 0,05. Di antara ketiga variabel tersebut, PKB memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD.

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		87
Poisson Parameter ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	158.74562
Most Extreme Differences	Absolute	.632
	Positive	.632
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		1.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.182
Exact Sig. (2-tailed)		.069
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data.
c. User-Specified

Sig. (2-tailed) sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients*			Collinearity Statistics			
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2780455.057	8005831355		12.057	,004		
PKB	2,692	,094	,496	2,986	,040	,089	11,225
BBNKB	-1,237	1,873	-,106	-1,506	,034	,089	11,218
PAP	1,988	6,669	,410	1,749	,030	,998	1,002

a. Dependent Variable: PAD

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai variance Inflation Factor (VIF) ketiga independen yaitu:

- PKB sebesar 11,225 ($11,225 > 10$) dan nilai tolerance 0,89 lebih besar dari 0,10
- BBNKB sebesar 11,218 ($11,218 > 10$) dan nilai tolerance 0,89 lebih besar dari 0,10
- PAP sebesar 1,002 ($1,002 > 10$) dan nilai tolerance 0,98 lebih besar 0,10 sehingga bisa ditarik Independen bahwa data independen tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	Model Summary*			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,957 ^a	,916	,913	209168817,309

a. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Dari hasil output uji autokorelasi uji durbin-watson yang dihasilkan adalah

$$d = 2,031$$

$$dL = 1,6108$$

$$dU = 1,7355$$

$$4-dL = 4 - 1,6108 = 2,3892$$

$$4-dU = 4-1,7355 = 2,2645$$

Karena $dU < d < 4-dU = 1,7355 < 2,031 < 2,2645$ yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients*				
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	2780455057	8005831355		12.057	,004
PKB	2,692	,094	,496	2,986	,040
BBNKB	-1,237	1,873	-,106	-1,506	,034
PAP	1,988	6,669	,410	1,749	,030

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$Y = 2,780455057 + 2,692X_1 - 837X_2 + 1,988X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil analisis menunjukkan, pada kolom pada constanta (a) adalah 2,780455057, bahwa jika PKB (X1), BBNKB (X2) dan PAP (X3) tidak ada maka PAD (Y) nilainya adalah Rp. 2,780455057 milyar.

- 2) Variabel PKB memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 2,692. Hal ini menunjukkan jika pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan 1%, maka PAD akan naik sebesar 2,692 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Ini menggambarkan bahwa variabel PKB berpengaruh positif terhadap PAD.
- 3) Variabel BBNKB memiliki nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,237. nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara variabel BBNKB dan PAD. Hal ini artinya jika variabel BBNKB mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel PAD mengalami penurunan sebesar 1,237, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Ini menggambarkan bahwa BBNKB berpengaruh negatif terhadap PAD.
- 4) Variabel PAP memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1,988. Hal ini menunjukkan jika PAP mengalami kenaikan 1%, maka PAD akan naik sebesar 1,988 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Ini menggambarkan bahwa variabel PAP berpengaruh positif terhadap PAD.

Tabel 6. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.618E+25	3	5.392E+24	123241907.6	.000 ^b
Residual	4.156E+18	95	4.375E+16		
Total	1.618E+25	98			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PKB

Berdasarkan tabel uji F diatas menghasilkan nilai F sebesar 12,324 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk menghitung F_{tabel} harus menentukan terlebih dahulu df_1 dan df_2 , dengan nilai signifikansi 0,05. Dimana df_1 adalah jumlah variabel bebas yaitu 3, sedangkan df_2 adalah nilai residual dari model ($n - k - 1$) sehingga ($87 - 3 - 1$). Dimana (n) adalah jumlah responden dan (k) adalah jumlah variabel bebas. Sehingga, F_{tabel} diperoleh nilai sebesar 2,715 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12,324 > 2,715$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa variabel independent yaitu PKB, BBNKB dan PAP secara bersama-sama mempengaruhi terhadap PAD.

Tabel 7. Uji T

Model	B	Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	2780455057	8005831355		12.057	.787
PKB	2.692	.094	.496	2.986	.040
BBNKB	-1.237	1.873	-.106	-1.506	.034
PAP	1.988	6.669	.410	1.749	.030

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 7 diketahui bahwa:

- Hasil dari t_{hitung} pada variabel PKB (X1) sebesar 2,986 artinya, lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,663) atau ($2,708 > 1,663$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,040 < 0,05$), maka hipotesis diterima.
- Hasil dari t_{hitung} pada variabel BBNKB (X2) sebesar 2,506 artinya, lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,663) atau ($1,506 < 1,663$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,034 < 0,05$), maka hipotesis ditolak.
- Hasil dari t_{hitung} pada variabel PAP (X3) sebesar 1,749 artinya, lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,663) atau ($1,749 > 1,663$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,030 < 0,05$), maka hipotesis diterima.

Tabel 8. Uji Koefisiensi Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
			Square	
1	.957 ^a	.916	.913	209168817.30857

a. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PKB

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui nilai Adjusted R Square adalah 0,913. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,3% sedangkan sisanya sebesar 8,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tidak berpengaruh terhadap PAD di provinsi tersebut. Pajak Air Permukaan (PAP)

juga berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Secara bersama-sama, PKB, BBNKB, dan PAP memberikan kontribusi sebesar 91,3% terhadap PAD, sementara sisanya 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (PKB, BBN-KB, dan PAP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi (*p*-value) < 0,05. Di antara ketiga variabel tersebut, PKB memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD. Adapun untuk masing-masing variabel, hasil uji t menunjukkan bahwa PKB (X1) memiliki hitung sebesar 2,969, yang lebih besar dari tabel 1,663, dengan nilai signifikansi 0,040, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan pajak pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor, semakin tinggi pula PAD, seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan kesadaran wajib pajak. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur PAD dan perkembangan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh Siahaan (2017), yang menyatakan bahwa PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penelitian ini juga sejalan dengan Wulandari dan Putri (2022) yang menunjukkan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat, namun bertentangan dengan Miftahul Hidayah (2018), yang menyatakan bahwa PKB kurang berkontribusi terhadap PAD. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai hitung untuk BBNKB (X2) sebesar 1,506, yang lebih kecil dari tabel 1,663, dengan nilai signifikansi 0,034, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan, sehingga pajak yang dibayarkan tidak masuk ke kas daerah yang bersangkutan. Untuk meningkatkan BBNKB, dapat dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan mengarah pada perluasan objek pajak dan pengembangan sistem penagihan,

seperti samsat online dan samsat keliling. Penelitian ini mendukung teori Ferdiansyah (2020), yang menyatakan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD dan berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai hitung sebesar 1,749, yang lebih besar dari tabel 1,663, serta nilai signifikansi 0,030 yang lebih kecil dari 0,05. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan air permukaan, semakin tinggi PAD yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa PAP berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan koefisien determinasi R²R² sebesar 0,935 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Jika penerimaan pajak air permukaan bertambah, maka PAD akan meningkat, sebaliknya, jika penerimaan PAP berkurang, PAD juga akan menurun.

Secara keseluruhan, uji simultan menunjukkan bahwa PKB, BBNKB, dan PAP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai Fhitung sebesar 12,324 yang lebih besar dari Ftabel 2,715 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD secara keseluruhan. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berkontribusi besar terhadap PAD, yang mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yundrika *et al.* (2023) dan Putri *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD di berbagai daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB, BBN-KB, dan PAP memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan PAD, dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang berkontribusi pada penerimaan PKB dan BBN-KB, serta semakin banyaknya objek PAP yang turut mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak. Secara parsial, PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka penerimaan PKB akan meningkat. Sebaliknya, BBN-KB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, karena banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan, yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan tidak masuk ke kas daerah yang bersangkutan. Di sisi lain, PAP berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan air permukaan akan berdampak pada peningkatan PAD. Sebagai saran, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor guna mempermudah pelayanan dan mengurangi piutang pajak. Selain itu, Bapenda Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak secara merata. Digitalisasi sistem penagihan dan pelaporan pajak juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel dan sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada UPTD Pependa Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga mencakup satuan kerja perangkat daerah di wilayah lainnya.

Daftar Pustaka

Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai

Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.

Ananda, S. M. W., & Idris, A. S. (2023). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 4(2).

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).

Bakry, U. S. (2015). Metodologi Penelitian: Kualitatif versus Kuantitatif. *Pustaka Pelajar*.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi.

Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.

Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN– Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(3), 385-399.

- [https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2247.](https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2247)
- Pratama, M. R., Warisi, D., & Alie, M. S. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 705-714.
- Samudra, A. A. (1995). Perpjakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah. (*No Title*).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*, 1(11).